

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peristiwa lumpur panas Lapindo di Sidoarjo telah terjadi lebih dari 4 tahun, dimulai pada tanggal 29 Mei 2006, namun sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Lumpur Sidoarjo merupakan salah satu permasalahan Bangsa Indonesia yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik. Permasalahan ini sudah seharusnya mendapatkan penanganan serius dari berbagai pihak. Semburan lumpur tepatnya terjadi di Porong, Semburan lumpur diperkirakan akan berhenti dalam rentang waktu puluhan hingga ratusan tahun lagi (Rovicky Dwi Putrohari, 2006). Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika secara perlahan kebocoran tersebut memuntahkan lumpur panas dan mulai menenggelamkan beberapa rumah, bangunan sekolah, pabrik, dan lahan pertanian yang berada di sekitarnya. Bahkan, pada saat *volume lumpur* mencapai kurang lebih 50.000 meter kubik per hari cakupan lokasi semakin meluas dengan korban yang semakin terus bertambah. Semburan yang akhirnya membentuk kubangan lumpur panas ini memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga sekitarnya. Daerah yang berdampak langsung tak kurang 10 pabrik harus tutup, 90 hektare sawah dan permukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi kurang lebih menenggelamkan 8 Desa yaitu: Desa Renokenongo, Kelurahan Jatirejo, Desa Kalitengah, Desa Basuki, Desa Pejarakan,

Desa Kedungbendo, Kelurahan Jatirejo dan kompleks Perumahan Tanggul Angin Sejahtera (Perum TAS) Sidoarjo (“Lumpur Sidoarjo”, 2007).

Semburan lumpur panas ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, melaporkan total warga yang dievakuasi pada awal munculnya lumpur sekitar 7.994 jiwa atau 2.064 keluarga, rumah yang rusak sebanyak 1.683 unit, 500 ha areal perkebunan rusak, dan 25 pabrik yang tenggelam terpaksa menghentikan produksinya dan merumahkan sekitar 1.873 orang. Di samping itu, Lumpur Sidoarjo juga telah menenggelamkan areal persawahan, pemukiman penduduk, sarana pendidikan, termasuk kerusakan lingkungan sekitar, rusaknya sarana dan prasarana (jaringan listrik dan telepon), terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat pula terhadap aktivitas produksi di kawasan Tanggulangin yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur (Ilah, 2006).

Di provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo dikenal sebagai penghasil minyak dan gas bumi, dimana dari 49 sumur yang terdapat di Jawa Timur (Blok Brantas), 43 sumur berada di Kabupaten Sidoarjo, 4 sumur di Kabupaten Mojokerto, dan 2 sumur di Kabupaten Pasuruan. Potensi minyak dan gas tersebut menyebabkan banyak perusahaan, baik swasta nasional maupun perusahaan luar negeri, yang berminat membuka perusahaan pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di daerah tersebut. Salah satu diantaranya adalah PT Lapindo Brantas Inc (LBI) yang berdiri sejak tahun 1996 dengan luas sekitar 3.050 km (Akbar, 2007). PT. LBI bertugas

melakukan eksplorasi gas di wilayah kerja blok brantas, yaitu di jalur aktif *mudvolcano* yang memanjang dari Purwodadi, Cepu, Bojonegoro, Porong. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, seperti gas kota, petrokimia, dan tenaga listrik di Jawa Timur, yang jumlah dan cadangannya semakin menipis (www.jatim.org, diakses 26 Maret 2012).

Bencana Lumpur Sidoarjo mendatangkan banyak dampak negatif bagi masyarakat yang bermukim di dekat tempat semburan Lumpur Sidoarjo, contohnya dari segi kesehatan: bagi masyarakat yang bertempat tinggal di porong khususnya Kelurahan Jatirejo, oksigen yang di hirup setiap hari dapat menimbulkan penyakit asma, karena lumpur yang meluap mengandung gas beracun, selain itu dampak sosial yang dirasakan bagi masyarakat Kelurahan Jatirejo terhadap bencana Lumpur Sidoarjo sehingga sebagian kecil harus mulai melakukan transmigrasi penduduk. Sehingga menyebabkan kenyamanan bersosialisasi akan terganggu, muncullah keresahan karena belum tercipta komunikasi dan penyesuaian tradisi yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Perpecahan warga mulai muncul menyangkut biaya ganti rugi, munculnya teori konspirasi penyuapan, hingga penolakan menyangkut lokasi pembuangan lumpur. Dan sebagainya, yang tidak mustahil gilirannya akan mampu memunculkan situasi konflik horisontal di antara warga, manakala pola penanganan secara komprehensif belum optimal dilaksanakan.

Steven A. Nelson (2002) menyebutkan dampak bencana bisa berlangsung cepat tapi bisa juga berlangsung sangat lama. Menurutnya, dampak bencana dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu dampak primer, sekunder dan tersier.

Dampak primer merupakan dampak yang terjadi akibat proses bencana itu misalnya bangunan hancur akibat gempa dll. Dampak sekunder merupakan dampak akibat dampak primer misalnya gempa menyebabkan tsunami dan longsor; hancurnya pusat tenaga listrik dll. Dampak tersier merupakan dampak jangka panjang misalnya hancurnya habitat pantai akibat tsunami; rusaknya air tanah dan terganggunya lingkungan sosial ekonomi masyarakat akibat luapan lumpur panas lapindo di Porong Sidoarjo.

Bencana lumpur panas juga berdampak pada kemunduran sosial ekonomi dan merusak tatanan sistem sosial yang telah lama dibangun diantara masyarakat sekitarnya. Status mereka yang semula bekerja menjadi menganggur, semula mempunyai usaha menjadi kehilangan usaha, dan yang memiliki tanah bahkan sudah menjadi juragan tanah, menjadi hilang begitu saja ditelan Lumpur Sidoarjo. Bahkan, para buruh tani, buruh tanam sudah tidak memiliki alternatif pekerjaan lagi. Anak-anak sekolah yang semula belajar dengan nyaman dan tenang, kini harus terbengkalai. Dengan demikian, secara sosiologis bisa dikatakan semburan Lumpur Sidoarjo tidak hanya berdampak secara fisik, namun juga telah membunuh proses kehidupan banyak orang.

Lumpur Sidoarjo merupakan bencana negara namun pada kenyataannya musibah itu terjadi akibat PT Lapindo yang salah dalam proses pengeboran minyak. Tetapi dari pihak PT Lapindo tidak seutuhnya menuntaskan permasalahan ini. Pemimpin dari PT Lapindo sendiri yaitu Aburiza Bakri sudah angkat tangan dalam menangani permasalahan ini dan menyerahkannya kepada negara, akibatnya

masyarakat yang menjadi korban Lumpur Sidoarjo tidak begitu di hiraukan sehingga mereka hidup terlantar.

Dalam menanggulangi masalah Lumpur Sidoarjo, Pemerintah telah membentuk Tim Penanggulangan Semburan Lumpur sesuai dengan Keputusan Presiden No. 13 tahun 2006. Tim ini bertugas untuk mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang meliputi penutupan semburan lumpur, penanganan luapan lumpur, dan penanganan masalah sosial yang ditimbulkannya. Sebagai tindak lanjut Kepres tersebut, pemerintah kemudian membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Tugas utama BPLS adalah menangani peraturan pembayaran jual beli asset lahan dan bangunan warga korban Lumpur Sidoarjo sesuai dengan Perpres No. 14 Tahun 2007, yaitu pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan bangunan warga korban lumpur dilakukan secara bertahap, tahap pertama uang muka 20 % dibayarkan dan sisanya 80% akan dilunasi dua tahun berikutnya.

Sebagai konsekuensi dari kegagalan pemerintah dalam menangani kasus Lumpur Sidoarjo, seluruh warga korban lumpur terpaksa berusaha agar dapat bertahan hidup melalui berbagai mekanisme atau strategi, baik secara individual, rumah tangga serta dalam lingkungan yang lebih luas dan memiliki jaringan kekerabatan ataupun dalam suatu ikatan komunitas. Secara terus menerus korban Lumpur Sidoarjo menuntut ganti rugi aset lahan dan bangunan dengan cara menjebol tanggul untuk menarik perhatian dan menyadarkan pihak-pihak yang bersangkutan bahwa mereka adalah orang-orang yang harus diperhatikan. Selain itu, mereka juga

melakukan demonstrasi dan unjuk rasa, hingga melakukan perjalanan ke Istana Merdeka untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka kepada presiden. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut, menegaskan bahwa kehidupan warga korban Lumpur Sidoarjo tidaklah nyaman. Ketidakpastian dalam penyelesaian dan penanganan bencana khususnya menyangkut masa depan korban, akan mampu membawa dampak psikologis seperti frustrasi dan gilirannya dapat berujung pada tindakan yang tidak diperkirakan sebelumnya (*intangible*), seperti berupa pemblokiran jalan-jalan utama seperti sudah diungkapkan di atas. Efek dominonya semakin menambah besar dampak kerugian tidak langsung dan kalau dibiarkan terus, satu fase lagi bisa menimbulkan kekacauan sosial (*social chaos*).

Menurut Rakhmat Jalaluddin (2005), suatu problem dapat digolongkan sebagai masalah sosial atau personal tergantung pada kriteria: Pertama, dari segi cause atau sebabnya. Masalah kerniskinan misalnya, bisa dilihat sebagai masalah personal atau masalah sosial tergantung pada penyebabnya. Kedua, dari segi *impacts* (akibat-akibat), yaitu bagaimana melihat suatu permasalahan yang ada sebagai masalah personal atau masalah sosial berserta konsekwensi akibatnya.

Selanjutnya, Rakhmat (2005) menjelaskan yang dimaksudkan dengan problem sosial yang dikemukakan oleh para ilrnuwan sosial sebagai sumber-sumber-sumber perubahan sosial adalah sebagai berikut: *Poverty* (kerniskinan), *Crimes* (kejahatan), *Conflict* (pertikaian atau konflik). Banyak korban Lumpur Sidoarjo mendadak miskin akibat lahan mereka terkena semburan lumpur sehingga tidak layak untuk di tempati. Scott (1990), menjelaskan upaya yang dilakukan kelompok miskin

guna mempertahankan hidupnya adalah, *pertama*, mereka dapat mengikat sabuk lebih kencang dengan mengurangi frekuensi makan dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah. *Kedua*, menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan-kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas atau bermigrasi. *Ketiga*, menggunakan jaringan sosial yang berfungsi sebagai peredam kejut selama masa krisis ekonomi.

Masalah-masalah sosial yang terjadi pada masyarakat korban lumpu lapindo merupakan masalah yang rumit. Masalah tersebut terjadi karena subsitem-subsistem di dalam masyarakat tidak bisa terjaga dengan utuh, akibatnya kondisi sosial menjadi tidak terkendali, contohnya kondisi sosial ekonomi yang terpuruk, menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat dikendalikan dengan norma-norma agama, mereka cenderung berpikir praktis dan jalan pintas. Kebutuhan biologis para suami yang sudah sekian lama tidak dapat terpenuhi, karena tidak ada tempat ‘privat’ serta ketidaksiapan psikologis isterinya, memicu untuk melakukannya dengan ‘pekerja seks’ dengan uang hasil ‘pemberian’ maupun ‘bantuan’ masyarakat, atau hasil kerja seadanya (parkir, penyeberangan atau jasa penunjuk jalan, dsb). Kondisi yang tak kunjung menampakkan penyelesaian ini nampaknya membutuhkan banyak ‘pemikiran’ untuk mencari jalan keluar, baik jalan keluar sosiologis maupun psikologis; namun untuk jalan keluar psisik adalah tanggungjawab Lapindo bersama Pemerintah.

Para korban lapindo semakin lama semakin terpuruk. Di Kelurahan Jatirejo merupakan Desa yang sistem sosial sudah tidak berfungsi, hal tersebut terjadi karena

tempat tinggal dan lahan-lahan sudah hancur lebur. Sistem sosial hancur bukan hanya di Kelurahan Jatirejo tetapi Desa-Desa yang menjadi korban keganasan luapan Lumpur Sidoarjo memakan korban sebanyak 8 Desa. Sarana pendidikan yang berada di 8 Desa rusak tidak tersisa dan toko-toko kecil yang berada di pinggir-pinggir jalan raya hancur lebur serta mengeluarkan semburan baru yang dapat memperparah kerusakan lingkungan karena mengandung gas beracun. Para korban korban lapindo beramai-ramai melakukan demonstrasi untuk memperjuangkan hidupnya. Mayoritas yang berdemo adalah para rumah tangga karena mereka di rugikan dan akan menenggelamkan mereka dalam jurang kemiskinan sehingga hidupnya akan memburuk. Carner dalam Korten dan Sjahrir (1998) menjelaskan bahwa strategi kelangsungan hidup yang ditempuh oleh kelompok miskin adalah: (1) para anggota rumah tangga menganekaragamkan kegiatan kerja mereka; (2) berpaling ke sistem penunjang yang ada di Desa, seperti sanak saudara atau keluarga yang lebih kaya yang mungkin dapat menyediakan bantuan; (3) bekerja lebih banyak dengan lebih sedikit makan, yang berarti meminimalkan konsumsi dan bahan-bahan pokok lainnya; dan (4) meninggalkan tempat yang selama ini ditempati dalam arti bermigrasi.

Setelah musibah tersebut terjadi, para korban Lumpur Sidoarjo bertempat tinggal di pengungsian. Setelah bertahan hampir 4 tahun, masyarakat yang masih bertahan di lokasi pengungsian di Pasar Baru Porong berada dalam posisi yang sangat terjepit, karena sejak April 2009, izin menempati lokasi Pasar Baru Porong telah berakhir sehingga mereka terpaksa harus pindah dari tempat tersebut. Saat ini mereka

bertempat tinggal di Desa Macan Mati, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dan di sepanjang jalan tol Porong yang tidak dapat difungsikan lagi, karena areal tol telah terendam Lumpur Sidoarjo.

Desa Macan Mati merupakan salah satu lokasi pengungsian terletak 3 km dari pusat semburan Lumpur Sidoarjo. Lokasi pengungsian ini merupakan areal perkebunan tebu milik pengusaha swasta yang dibeli oleh masyarakat korban Lumpur Sidoarjo secara urunan (patungan) dari uang ganti rugi atas tanah dan bangunan rumah mereka yang telah diterima sebesar 20%. Setiap warga memperoleh 1 kapling dengan luas tanah 8 x 15 meter dengan harga Rp. 17 juta. Semua warga yang bertempat tinggal di lokasi ini dibatasi hanya warga yang berasal dari Kelurahan Jatirejo karena merupakan kelurahan yang menjadi pusat kedua terjadinya semburan Lumpur Sidoarjo. Ketentuan ini dirumuskan untuk menghindari masuknya warga pendatang di lokasi tersebut, sehingga sanak keluarga dan kerabat mereka yang dulunya tinggal di Kelurahan Jatirejo dapat berkumpul kembali dan kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dihidupkan dan diteruskan kembali. Dapat diketahui bahwa penanganan korban Lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong-Sidoarjo masih kurang baik dari segi sosial tidak ada penanganan dari pemerintah melalui BPLS baik dari segi penggantian mata pencaharian dan bantuan-bantuan terhadap korban Lumpur Sidoarjo, sedangkan masalah ganti rugi hanya 20% di awal dan 80% di cicil itupun tidak sesuai dengan perjanjian dan sering terjadi keterlambatan pembayaran. Dari sini saja sudah sangat terlihat bahwa semua pihak terasa saling angkat tangan melempar tanggung jawab. Dengan adanya bencana

Lumpur Sidoarjo banyak yang sulit untuk mencari mata pencharian untuk menghidupi dirinya sendiri. Dari segi pendidikan untuk sementra siswa-siswi melakuakn proses pembelajaran dengan cara menyewa sekolah lain yang tidak menjadi korban Lumpur Sidoarjo, selain itu salah satu sekolah juga mengadakan proses pembelajaran di tempat pengungsian agar proses pembelajaran tetap berjalan, meskipun demikian maka terdapat problema yang cukup besar serta meresahkan baik guru ataupun siswa-siswinya, untuk itu pemerintah memberikan dana BOS agar dapat sekikit meringankan beban mereka.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang dibentuk untuk menangani masalah Lapindo ternyata tidak cukup tuntas menyelesaikan masalah - masalah sosial akibat semburan Lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi sosial korban bencana lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo pra bencana, pada saat bencana, pasca bencana ?
2. Bagaimana proses perubahan sosial pada korban bencana lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui proses perubahan sosial pada korban bencana lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo
2. Dapat mengetahui kondisi sosial korban bencana lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo pra bencana, pada saat bencana, pasca bencana.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, di antaranya :

a. Keilmuan

1. Sebagai Informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perubahan sosial di dalam masyarakat.

b. Masyarakat (Pembaca)

1. Memberikan gambaran mengenai proses perubahan sosial pada korban bencana lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo pra bencana, pada saat bencana, pasca bencana.
2. Untuk mengetahui Kondisi sosial korban bencana lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo pra bencana, pada saat bencana, pasca bencana,

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Peristiwa Lumpur Sidoarjo merupakan peristiwa bencana yang sudah tidak asing di telinga masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan peristiwa ini sudah sampai di telinga negara-negara di dunia, sehingga banyak masyarakat tertarik untuk meneliti peristiwa Lumpur Sidoarjo baik dari sisi religius korban Lumpur Sidoarjo, maupun dampak-dampak sosial dan kandungan-kandungan yang berada di dalam Lumpur Sidoarjo.

Ada penelitian seorang mahasiswa ITS bernama Maryono Adi Widodo menemukan dari hasil penelitiannya tentang pemanfaatan lumpur. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dalam skala laboratorium, sangat memungkinkan bahwa

Lumpur Sidoarjo dapat dimanfaatkan untuk batu bata dan *paving block*. Hal ini dikarenakan batu bata yang terbuat dari Lumpur Sidoarjo mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada batu bata yang terbuat dari lempung. Nilai ekonomis lumpur sebagai bahan bangunan diharapkan dapat menjadi alternatif bagaimana pembuangan lumpur dilakukan. Dari beberapa uji coba tersebut dimungkinkan Lumpur Sidoarjo dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuat beton ringan (Totok Noerwasito, 2006).

Penelitian dari Timur Abimanyu (2012) mengenai fungsi hukum terhadap sosial kontrol terhadap dampak pencemaran Lumpur Sidoarjo Sidoarjo. Peristiwa luapan Lumpur Sidoarjo sidoarjo yang disebabkan karena tidak terdapatnya sosial kontrol serta kurangnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran dari akibat dampak pencemaran Lingkungan Hidup yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 1997, dan berkaitan dengan masalah tersebut Walhi sebagai wadah pengamat yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap lingkungan hidup yang seharusnya lebih serius untuk mengamati gejala-gejala yang terjadi di sidoarjo surabaya jawa timur. Dimana kelalaian yang telah terjadi yang menyebabkan luapan lumpur panas tersebut adalah merupakan sudah menjadi tugas pemerintah untuk melaksanakan ketentuan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No7/2004 tentang Sumber Daya Air c.q PP No.42/2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air dan UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

1.5.2 Landasan Teori

1.5.2.1 Teori Perubahan Sosial Ferdinand Tonnies

Ferdinan Tonnies (1855-1936), adalah seorang sosiolog dari Jerman yang turut membangun institusi terbesar yang sangat berperan sosiologi Jerman. Karya Ferdinan Tonnies yang paling terkenal adalah *Gemeinschaft und Gesselchaft* (1887). Karyanya yang lain adalah *Einführung in di Soziologie* (An Introduction to sociology).

Tonnies memiliki teori yang penting yang akhirnya berhasil membedakan konsep tradisional dan modern dalam suatu organisasi sosial, yaitu *Gemeinschaft* (yang diartikan sebagai kelompok atau asosiasi) dan *Gesellschaft* (yang diartikan sebagai masyarakat atau masyarakat modern-istilah Piotr Sztompka). Setelah sebelumnya Weber menegaskan bahwa ia melihat bahwa perubahan masyarakat terlihat pada kecenderungan menuju rasionalisasi kehidupan sosial dan organisasi sosial di segala bidang (pertimbangan instrumental, penekanan efisiensi, menjauhkan diri dari emosi dan tradisi, impersonalitas, manajemen birokrasi dan sebaliknya). Senada dengan hal itu, Durkheim menegaskan bahwa perkembangan pembagian kerja pun akan diikuti integrasi masyarakat melalui “solidaritas organik” yang menimbulkan ikatan yang saling menguntungkan dan kontribusi anggota masyarakat akan saling melengkapi.

Tonnies memasukkan *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft* di bukunya (1887) satu diantara beberapa nomor yang dipaparkan, sebagai salah satu teori yang bersifat modern. Menurutnya *Gemeinschaft* adalah sebagai situasi yang berorientasi nilai-nilai, aspiratif, memiliki peran, dan terkadang sebagai kebiasaan asal yang

mendominasi kekuatan sosial. Jadi baginya secara tidak langsung *Gemeinschaft* timbul dari dalam individu dan adanya keinginan untuk memiliki hubungan atau relasi yang didasarkan atas kesamaan dalam keinginan dan tindakan. Individu dalam hal ini diartikan sebagai pelekat/perekat dan pendukung dari kekuatan sosial yang terhubung dengan teman dan kerabatnya (keluarganya), yang dengannya mereka membangun hubungan emosional dan interaksi satu individu dengan individu yang lain. Status dianggap berdasarkan atas kelahiran, dan batasan mobilisasi juga kesatuan individu yang diketahui terhadap tempatnya di masyarakat. *Gemeinschaft* juga bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Bentuk *gemeinschaft* adalah keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga dan sebagainya. kehidupan *gemeinschaft* cenderung lebih mementingkan nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan daripada peraturan-peraturan yang bersifat individualitas, ini artinya kepentingan masyarakat lebih utama dan individu harus tunduk dibawahnya. Kepentingan-kepentingan pribadi harus dinomorduakan setelah kepentingan-kepentingan kelompok, hubungan didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang kuat dan tradisional (Sztompka, 1994).

Sedangkan *Gesellschaft*, sebagai sesuatu yang kontras, menandakan terhadap perubahan yang berkembang, berperilaku rasional dalam suatu individu dalam kesehariannya, hubungan individu yang bersifat *superficial* (lemah, rendah, dangkal), tidak menyangkut orang tertentu, dan seringkali antar individu tak mengenal, seperti tergambar dalam berkurangnya peran dan bagian dalam tataran nilai, latar belakang, norma, dan sikap, bahkan peran pekerja tidak terakomodasi

dengan baik seiring dengan bertambahnya arus urbanisasi dan migrasi juga mobilisasi. *Gesellschaft* (patembayan) juga merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka serta strukturnya bersifat mekanis sebagaimana dapat diumpamakan sebagai sebuah mesin. hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik misalnya ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik. kehidupan *gesellschaft* terdapat hubungan yang telah diperhitungkan untung dan ruginya dalam setiap perjanjian kerjasama, dari sinilah terdapat spesialisasi kerja atau pembagian tugas, setiap tindakan selalu didasarkan pada alasan kepentingan pribadi (Sztompka, 1994).

Tonnies memaparkan *gemeinschaft* adalah *wessenwill*, yaitu bentuk-bentuk kehendak, baik dalam arti positif maupun negatif, yang berakar pada manusia dan diperkuat oleh agama dan kepercayaan, yang berlaku di dalam bagian tubuh dan perilaku atau kekuatannaluri. Jadi, *wessenwill* itu sudah merupakan kodrat manusia yang timbul dari keseluruhan kehidupan alami. *Gesselchaft* disebut dengan konsep *kurwille* yang merupakan bentuk-bentuk kehendak yang mendasarkan pada akal manusia yang ditunjukan pada tujuan-tujuan tertentu dan sifatnya rasional dengan menggunakan alat-alat dari unsur-unsur kehidupan lainnya atau dapat pula berupa pertimbangan dan pertolongan (Sztompka, 1994).

Tonnies membedakan *gemeinschaft* menjadi tiga jenis. Pertama, *gemeinschaft by blood*, yaitu *gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada ikatan darah atau keturunan. Pertumbuhan serta ikatan kekerabatan masyarakat yang semacam ini semakin lama semakin menipis. Kedua, *gemeinschaft of place(locality)*, yaitu

gemeinschaft yang mendasarkan diri pada tempat tinggal yang saling berdekatan, sehingga dimungkinkan terjadinya saling menolong, misalnya ikatan yang terbentuk karena adanya satu wilayah tempat tinggal, satu RT, satu desa atau satu kompleks perumahan. Ketiga, *gemeinschaft of mind*, yaitu *gemeinschaft* yang mendasarkan diri pada ideologi atau pikiran yang sama, misalnya individu yang tergabung dalam satu negara, partai politik, atau satu keyakinan (agama) (Sztompka, 1994). Ketiga bentuk ini dapat di temui pada masyarakat, baik di kota maupun di desa.

Ciri-ciri Hubungan *Gemeinschaft* dan *Gesellschaft*. Ciri-cirinya ada dibawah ini gan:

<i>Gemeinschaft</i>	<i>Gesellschaft</i>
Adanya hubungan perasaan kasih sayang	Hubungan antaranggota bersifat formal
Adanya keinginan untuk meningkatkan kebersamaan	Memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal
Tidak suka menonjolkan diri	Memperhitungkan nilai guna (<i>utilitarian</i>)
Selalu memegang teguh adat lama yang konservatif	Lebih didasarkan pada kenyataan sosial
Terdapat ikatan batin yang kuat antaranggota	
Hubungan antaranggota bersifat informal	

1.5.2.2 Konsep Perubahan Sosial

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan,

lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal.

Definisi perubahan sosial menurut beberapa ahli sosiologi :

- a. William F.Ogburn mengemukakan bahwa “ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial”.
- b. Kingsley Davis mengartikan “perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”.
- c. MacIver mengatakan “perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial”.
- d. JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan “perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”.
- e. Samuel Koenig mengatakan bahwa “perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia”.

Karakteristik Perubahan Sosial

Perubahan Sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.
- b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- c. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial.
- d. Suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
- e. Modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia
- f. Segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Proses Perubahan Sosial

1. Penemuan baru (*discovery*) yaitu penemuan merupakan persepsi manusia yang dianut secara bersama, mengenai suatu aspek kenyataan yang semula sudah ada.

2. Invensi (*Invention*) yaitu suatu kombinasi baru/ cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada.
3. Difusi (*diffusion*) yaitu penyebaran unsur-unsur budaya dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

Bentuk-bentuk Perubahan

- a. Perubahan lambat dan perubahan cepat

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu yang lama, rentetan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan kondisi-kondisi baru yang timbul sejalan pertumbuhan masyarakat.

Sementara itu perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Secara sosiologis agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

- 1) Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan.
- 2) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut.

- 3) Pemimpin diharapkan dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerakan.
- 4) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat.
- 5) Harus ada momentum yaitu saat di mana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan.

b. Perubahan kecil dan perubahan besar

Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau yang berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian, misalnya, tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat dalam keseluruhannya, karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yaitu membawa pengaruh besar pada masyarakat.

c. Perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*)

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki

perubahan dinamakan *agen of chage* yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki atau berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat.

d. Perubahan Struktur dan Perubahan Proses

Perubahan struktural yaitu perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan reorganisasi dalam masyarakat. Misalnya penggunaan alat-alat yang canggih pada perkebunan. Sedangkan perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya revisi pasal-pasal Undang-undang Dasar. Sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pasal-pasal dalam undang-undang.

Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat pada waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupannya yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi mengatakan bahwa

secara umum penyebab dari perubahan sosial budaya dibedakan atas dua golongan besar, yaitu:

- a. Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
- b. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat.

Secara jelas akan dipaparkan di bawah ini:

- a. Perubahan yang berasal dari masyarakat.

- 1) Bertambah atau berkurangnya penduduk.

Perubahan jumlah penduduk merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial, seperti pertambahan atau berkurangnya penduduk pada suatu daerah tertentu. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara pada daerah lain terjadi kekosongan sebagai akibat perpindahan penduduk tadi.

- 2) Penemuan-penemuan baru

Penemuan-penemuan baru akibat perkembangan ilmu pengetahuan baik berupa teknologi maupun berupa gagasan-gagasan menyebar kemasyarakat, dikenal, diakui, dan selanjutnya diterima serta menimbulkan perubahan sosial. Menurut Koentjaraningrat faktor-faktor yang mendorong individu untuk mencari penemuan baru adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran dari orang perorangan karena kekurangan dalam kebudayaannya.
2. Kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan.

3. Perangsang bagi aktivitas-aktivitas penciptaan dalam masyarakat.

3) Pertentangan (konflik) dalam masyarakat

Pertentangan dalam nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya secara luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan bila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma dan adat istiadat yang telah diikutinya selama ini.

4) Terjadinya pemberontakan atau revolusi

Pemberontakan atau revolusi dapat merombak seluruh aspek kehidupan sampai pada hal-hal yang mendasar seperti yang terjadi pada masyarakat Inggris, Prancis dan Rusia.

b. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat.

1) Sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada disekitar manusia.

Menurut Soerjono Soekanto sebab yang bersumber pada lingkungan alam fisik yang kadang-kadang disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat itu sendiri. Misalnya, penebangan hutan secara liar oleh segolongan anggota masyarakat memungkinkan untuk terjadinya tanah longsor, banjir dan lain sebagainya.

2) Peperangan

Peperangan yang terjadi dalam satu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak negatif yang sangat dahsyat karena peralatan perang sangat canggih.

3) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Adanya interaksi langsung antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya akan menyebabkan saling pengaruh. Selain itu pengaruh dapat berlangsung melalui komunikasi satu arah yakni komunikasi masyarakat dengan media-media massa. Ada empat tipe respon psikologis individu terhadap *cross-cultural contact* :

Pertama, tipe *passing* yaitu individu menolak kebudayaan yang asli dan mengadopsi kebudayaan yang baru. Kedua, tipe *chauvinist* yaitu individu menolak sama sekali pengaruh-pengaruh asing. Ketiga, tipe *marginal* yaitu respon yang terombang ambing di antara kebudayaan asli dengan kebudayaan asing. Keempat, *mediating* yaitu individu dapat menyatukan bermacam-macam identitas budaya.

1.5.2.3 Konsep Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 24/2007).

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia definisi bencana adalah peristiwa/kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Sedangkan definisi bencana (*disaster*) menurut WHO adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia atau

memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Bencana adalah situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tergantung pada cakupannya, bencana ini bisa merubah pola kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, menghilangkan harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur sosial masyarakat, serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar (BAKORNAS PBP).

Suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004).

Jenis Bencana (UU 24/2007) :

a. *Bencana Alam :*

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

b. *Bencana non-Alam :*

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

c. *Bencana Sosial :*

Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Fase-fase Bencana

Menurut Barbara Santamaria (1995), ada 3 fase dalam terjadinya suatu bencana, yaitu fase *preimpact*, fase *impact* dan fase *postimpact*.

1. Fase *preimpact* merupakan *warning phase*, tahap awal dari bencana. Informasi didapat dari badan satelit dan meteorologi cuaca. Seharusnya pada fase inilah segala persiapan dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga, dan warga masyarakat.
2. Fase *impact* merupakan fase terjadinya klimaks dari bencana. Inilah saat-saat dimana manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup (*survive*). Fase *impact* ini terus berlanjut hingga terjadi kerusakan dan bantuan-bantuan darurat dilakukan.
3. Fase *postimpact* adalah saat dimulainya perbaikan dan penyembuhan dari fase darurat, juga tahap dimana masyarakat mulai berusaha kembali pada fungsi komunitas normal. Secara umum dalam fase *postimpact* ini para korban akan mengalami tahap respon psikologis mulai penolakan, marah, tawar-menawar, depresi hingga penerimaan.

1.5.2.4 Konsep Lumpur Sidoarjo

[Banjir Lumpur Panas](#) Sidoarjo atau lebih dikenal sebagai bencana Lumpur Sidoarjo, adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran

[Lapindo Brantas Inc](#) di Kelurahan Jatirejo, Kecamatan [Porong](#), [Kabupaten Sidoarjo](#), [Jawa Timur](#), sejak tanggal [29 Mei 2006](#). Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga Kecamatan di sekitarnya, serta memengaruhi aktivitas perekonomian di [Jawa Timur](#).

Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni Kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol (Kabupaten Pasuruan) di sebelah selatan. Lokasi pusat semburan hanya berjarak 150 meter dari sumur Banjar Panji-1 (BJP-1), yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Brantas Inc sebagai operator blok Brantas. Oleh karena itu, hingga saat ini, semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Brantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Brantas sendiri punya dua teori soal asal semburan. Pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kesalahan prosedur dalam kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Namun bahan tulisan lebih banyak yang condong kejadian itu adalah akibat pengeboran.

Lokasi semburan lumpur tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur. Tak jauh dari lokasi semburan terdapat jalan tol Surabaya-Gempol, jalan raya Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi (jalur pantura timur), serta jalur kereta api lintas timur Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi, Indonesia.

Penyebab kejadian

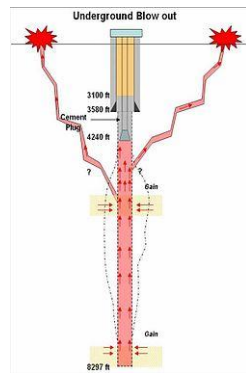
Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak itu diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006, setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US\$ 24 juta.

Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki (2590 meter) untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (*casing*) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi *circulation loss* (hilangnya lumpur dalam formasi) dan *kick* (masuknya fluida formasi tersebut ke dalam sumur) sebelum pengeboran menembus formasi Kujung.

Sesuai dengan Desain awalnya, Lapindo “sudah” memasang *casing* 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, *casing* 20 inchi pada 1195 kaki, *casing (liner)* 16 inchi pada 2385 kaki dan *casing* 13-3/8 inchi pada 3580 kaki (Lapindo Press Rilis ke wartawan, 15 Juni 2006). Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka “belum” memasang casing 9-5/8 inchi yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki).

Diperkirakan bahwa Lapindo, sejak awal merencanakan kegiatan pemboran ini dengan membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka membuat prognosis dengan mengasumsikan zona pemboran mereka di zona Rembang dengan target

pemborannya adalah formasi Kujung. Padahal mereka membor di zona Kendeng yang tidak ada formasi Kujung-nya. Alhasil, mereka merencanakan memasang *casing* setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak meng-*casing* lubang karena kegiatan pemboran masih berlangsung. Selama pemboran, lumpur *overpressure* (bertekanan tinggi) dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (*blow out*) tetapi dapat di atasi dengan pompa lumpurnya Lapindo (Medici).



Underground Blowout (semburan liar bawah tanah)

Setelah kedalaman 9297 kaki, akhirnya mata bor menyentuh batu gamping. Lapindo mengira target formasi Kujung sudah tercapai, padahal mereka hanya menyentuh formasi Klitik. Batu gamping formasi Klitik sangat *porous* (bolong-bolong). Akibatnya lumpur yang digunakan untuk melawan lumpur formasi Pucangan hilang (masuk ke lubang di batu gamping formasi Klitik) atau *circulation loss* sehingga Lapindo kehilangan/kehabisan lumpur di permukaan.

Akibat dari habisnya Lumpur Sidoarjo, maka lumpur formasi Pucangan berusaha menerobos ke luar (terjadi *kick*). Mata bor berusaha ditarik tetapi terjepit

sehingga dipotong. Sesuai prosedur standard, operasi pemboran dihentikan, perangkat *Blow Out Preventer (BOP)* di rig segera ditutup & segera dipompakan lumpur pemboran berdensitas berat ke dalam sumur dengan tujuan mematikan *kick*. Kemungkinan yang terjadi, fluida formasi bertekanan tinggi sudah terlanjur naik ke atas sampai ke batas antara *open-hole* dengan selubung di permukaan (*surface casing*) 13 3/8 inchi. Di kedalaman tersebut, diperkirakan kondisi geologis tanah tidak stabil & kemungkinan banyak terdapat rekahan alami (*natural fissures*) yang bisa sampai ke permukaan. Karena tidak dapat melanjutkan perjalanannya terus ke atas melalui lubang sumur disebabkan BOP sudah ditutup, maka fluida formasi bertekanan tadi akan berusaha mencari jalan lain yang lebih mudah yaitu melewati rekahan alami tadi & berhasil. Inilah mengapa *surface blowout* terjadi di berbagai tempat di sekitar area sumur, bukan di sumur itu sendiri.

Upaya penanggulangan

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk menanggulangi luapan lumpur, diantaranya dengan membuat tanggul untuk membendung area genangan lumpur. Namun demikian, lumpur terus menyembur setiap harinya, sehingga sewaktu-waktu tanggul dapat jebol, yang mengancam tergenangnya lumpur pada permukiman di dekat tanggul. Jika dalam tiga bulan bencana tidak tertangani, adalah membuat waduk dengan beton pada lahan seluas 342 hektar, dengan mengungsikan 12.000 warga. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, untuk menampung lumpur sampai Desember 2006, mereka menyiapkan 150 hektare waduk baru. Juga ada cadangan 342 hektare lagi yang sanggup memenuhi kebutuhan hingga Juni 2007. Akhir

Oktober, diperkirakan volume lumpur sudah mencapai 7 juta m³. Namun rencana itu batal tanpa sebab yang jelas.

Dampak Sosial Lumpur Sidoarjo

Semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sampai Mei 2009, PT Lapindo, melalui PT Minarak Lapindo Jaya telah mengeluarkan uang baik untuk mengganti tanah masyarakat maupun membuat tanggul sebesar Rp. 6 Triliun.

1. Lumpur menggenangi 16 Desa di tiga Kecamatan. Semula hanya menggenangi empat Desa dengan ketinggian sekitar 6 meter, yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga menggenangi sarana pendidikan dan Markas Koramil Porong. Hingga bulan [Agustus 2006](#), luapan lumpur ini telah menggenangi sejumlah Desa/kelurahan di Kecamatan Jabon, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.
2. Lahan dan ternak yang tercatat terkena dampak lumpur hingga Agustus 2006 antara lain: lahan tebu seluas 25,61 ha di Renokenongo, Jatirejo dan Kedungcangkring; lahan padi seluas 172,39 ha di Jatirejo, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul, Besuki Jabon dan Pejarakan Jabon; serta 1.605 ekor unggas, 30 ekor kambing, 2 sapi dan 7 ekor kijang.

3. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan ribuan tenaga kerja. Tercatat 1.873 orang tenaga kerja yang terkena dampak lumpur ini.
4. Empat kantor pemerintah juga tak berfungsi dan para pegawai juga terancam tak bekerja.
5. Tidak berfungsinya sarana pendidikan (SD, SMP), Markas Koramil Porong, serta rusaknya sarana dan prasarana infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)
6. Rumah/tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur dan rusak sebanyak 1.683 unit. Rinciannya: Tempat tinggal 1.810 (Jatirejo 142, Jatirejo 480, Renokenongo 428, Kedungbendo 590, Besuki 170), sekolah 18 (7 sekolah negeri), kantor 2 (Kantor Koramil dan Kelurahan Jatirejo), pabrik 15, masjid dan musala 15 unit.
7. Kerusakan lingkungan terhadap wilayah yang tergenangi, termasuk areal persawahan
8. Pihak Lapindo melalui Imam P. Agustino, General Manager PT Lapindo Brantas, mengaku telah menyisihkan US\$ 70 juta (sekitar Rp 665 miliar) untuk dana darurat penanggulangan lumpur.
9. Akibat amblesnya permukaan tanah di sekitar semburan lumpur, pipa air milik PDAM Surabaya patah.
10. Meledaknya pipa gas milik Pertamina akibat penurunan tanah karena tekanan lumpur dan sekitar 2,5 kilometer pipa gas terendam.

11. Ditutupnya ruas jalan tol Surabaya-Gempol hingga waktu yang tidak ditentukan, dan mengakibatkan kemacetan di jalur-jalur alternatif, yaitu melalui Sidoarjo-Mojosari-Porong dan jalur Waru-tol-Porong.
12. Tak kurang 600 hektar lahan terendam.
13. Sebuah SUTET milik PT PLN dan seluruh jaringan telepon dan listrik di empat Desa serta satu jembatan di Jalan Raya Porong tak dapat difungsikan.

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan untuk mendapat pemahaman atas fenomena yang di teliti. Dengan pendekatan kualitatif, aspek-aspek simbolik dan non-verbal yang dirasakan dan dialami serta di hayati individu diharapkan dapat lebih di pahami secara mendalam (Moleong, 2006:23)

Penelitian kualitatif sebenarnya mempunyai beberapa pendekatan penelitian dan dari penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Menurut Creswell (1998:54), Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut *epoche* (jangka waktu). Konsep *epoche* adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep

epoche menjadi pusat di mana peneliti menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh informan.

1.6.1 Sumber Data

a. Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang proses hancurnya sistem sosial akibat bencana alam Lumpur Sidoarjo. Sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara pada masyarakat yang terkena yang menjadi korban bencana lumpur Sidoarjo yaitu masyarakat Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumentasi berbagai instansi pemerintah serta berasal dari sumber internet.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

➤ Observasi:

Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti "melihat" dan "memperhatikan". Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi menjadi bagian dalam penelitian berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu-ilmu sosial, Observasi dapat berlangsung dalam konteks laboratorium (*experimental*) maupun konteks alamiah. Observasi yang berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. Sebagai metode ilmiah observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung misalnya melalui questionnaire dan tes (Rahayu, Iin Tri, S.Psi dan Ardani, Tristiadi Ardi, S.Psi, M.Si. 2004. *Observasi dan Wawancara*. Malang: Bayumedia).

➤ Wawancara mendalam

Merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau

tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Dengan demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan.

➤ Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Dari uraian di atas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

➤ Diskusi Kelompok

Moh. Surya (1975:107) mendefinisikan diskusi kelompok merupakan suatu proses bimbingan dimana murid-murid akan mendapatkan suatu kesempatan untuk menyumbangkan pikiran masing-masing dalam memecahkan masalah bersama. Dalam diskusi ini tetanam pula tanggung jawab dan harga diri.

Moh. Uzer Usman (2005:94) menyatakan bahwa diskusi kelompok merupakan suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah.

1.6.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam, yaitu informan kunci(*key informan*), informan utama dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto, 2005 : 171).

Berapa jumlah responden atau informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan. Hal ini karena pengumpulan data suatu penelitian kualitatif mempunyai tujuan tercapainya kualitas data yang memadai, sehingga sampai dengan responden yang seberapa data telah dalam keadaan “tidak berkualitas” lagi dalam arti sudah mencapai titik jenuh karena responden tersebut sudah tidak lagi memberi informasi baru lagi, artinya responden tersebut “ceritanya” sama saja dengan responden-responden sebelumnya (Hamidi, 2004 : 76).

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005 : 96).

Pada penelitian ini, peneliti menentukan informan inti/kunci yaitu masyarakat korban Lumpur Sidoarjo yang masih bertempat tinggal di Kelurahan Jatirejo.

Sedangkan informan tambahan yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di dekat Kelurahan Jatirejo.

1.6.4 Lokasi dan waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Lokasi tersebut dipilih secara sengaja (*purposive*) oleh peneliti, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses perubahan sosial. Lokasi ini merupakan Desa ke dua yang terdampak paling parah setelah Desa Renokenongo.

b. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dimulai dari Mei 2012 dimana penelitian ini peneliti lakukan dengan survei terlebih dahulu setelah survei dilakukan peneliti mencoba menggali informasi dari salah satu masyarakat Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada bulann Mei 2012.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman yang menyatakan tiga jalur analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong , 2006: 65).

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari

bahan-bahan tertulis dilapangan maupun hasil-hasil wawancara mendalam yang dilakukan. Data tersebut berupa data sekunder dan data primer.

Penyajian data merupakan proses memaparkan informasi yang diperoleh secara sistematis dan menyeluruh. Data yang dilakukan di dapatkan dari lapangan melalui wawancara mendalam kepada masyarakat Kelurahan Jatirejo.

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data interpretasi peneliti. Selain metode analisis diatas, untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh dalam penelitian ini, juga dipergunakan teknik triangulasi data yaitu dengan memanfaatkan hal yang diluar data yang ada untuk mengecek atau pembandingan terhadap data yang diperoleh dilapangan. Dengan merujuk pada metode triangulasi Denzin, maka dalam penelitian ini, triangulasi data hasil penelitian akan dilakukan berdasarkan triangulasi sumber dan triangulasi penyelidikan (Moleong, 2006:78).

Menunjuk pada metode triangulasi Denzi, maka dalam penelitian ini, triangulasi data hasil penelitian akan dilakukan berdasarkan triangulasi sumber dan triangulasi penyelidikan (Moleong, 2006:78). Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap korban Lumpur Sidoarjo di Kelurahan Jatirejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, dengan membandikan antara informan yang dipaparkan di depan umum dengan informan yang dipaparkan secara pribadi, serta membandingkan antara perspektif informan dengan perspektif pihak lain. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas tingkat kebenaran sumber data yang di dapat

dari lapangan. Triangulasi penyelidikan dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang diluar komunitas subyek penelitian. Hal ini di tempuh untuk mempertinggi tingkat kebenaran sumber data dari lapangan.